

ABSTRAKS

Novi Kurniasari, 11680102004: “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka”.

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS merupakan aturan yang mengatur disiplin pegawai, yang didalamnya memuat kewajiban, larangan, dan hukuman. Peraturan ini berlaku bagi semua instansi pemerintahan, termasuk juga bagi Kecamatan Banjaran yang merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Majalengka yang memiliki potensi untuk turut memajukan pemerintahan Kabupaten Majalengka, baik dari pemerintah kecamatan maupun dari sumber dayanya. Untuk dapat mewujudkan pegawai yang disiplin maka peraturan ini harus diimplementasikan. Sebagaimana yang diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran dan tujuan dari peraturan disiplin, sumberdaya yang melaksanakan peraturan disiplin, karakteristik agen pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan disiplin, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan disiplin, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan disiplin, dan keterlibatan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam pengimplementasian peraturan disiplin PNS di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn yang melihat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan dari 6 (enam) dimensi, yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, (5) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilakukan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah sehingga mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna yaitu data yang sebenarnya sehingga memperoleh gambaran secara utuh. Dalam hal ini menggambarkan mengenai implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan disiplin PNS sudah terlaksana tetapi belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari dua dimensi yang belum terlaksana dengan optimal, yaitu: (1) sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, dimana sebagian pegawai tidak taat masuk kerja dan mentaati jam kerja terlihat dari sikap pegawai yang telat datang ke kantor dan keluar kantor tanpa keterangan yang jelas; dan (2) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dimana peraturan disiplin pegawai negeri sipil ini belum tersosialisasi secara merata dan kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga ada sebagian pegawai yang belum memahami dengan jelas isi dari peraturan tersebut. Sedangkan, pelaksanaan aturan tersebut dilihat dari keempat dimensi lainnya, yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, dan (4) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sudah terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Disiplin, Masuk Kerja dan Mentaati Jam Kerja.

ABSTRACTS

Novi Kurniasari, 1168010204. Implementation of Government Regulation No. 53 year 2010 on the Discipline of Civil Servants in Banjaran District of Majalengka Regency.

Government Regulation number 53 year 2010 about the discipline of civil servants is a rule that regulates the discipline of officers, in which it contains obligations, prohibitions, and penalties. This regulation applies to all government agencies, including also for Banjaran sub-district which is one of the district in Majalengka regency that has a great potential to contribute to the government of Majalengka Regency, both from the district and from its resources. To be able to realize a disciplined employee then this rule must be implemented. As it is known that the implementation of the policy is an action undertaken by individuals or groups of government or private who are directed toward achieving the objectives set forth in the previous policy decision.

This research aims to determine the size and objectives of the discipline, resources that implement disciplinary rules, attitudes/tendencies (disposition) of the executive in implementing disciplinary rules, and the involvement of economic, social, and political environment in the implementation of the discipline rules of civil servants in the district of Banjaran regency of Majalengka.

The theory used in this study was the of Donald Van Metter and Carl Van Horn who saw the success of the implementation of policy implementations of 6 (six) dimensions, namely: (1) the size and objectives of policies, (2) resources, (3) the characteristics of implementing agents, (4) attitudes/tendencies (disposition) the executive, (5) communication between organizations and implementing activities, and (6) economic, social, and political environment.

The research used qualitative research methods with a descriptive approach, which is done to examine the condition of the natural object so that the data is deep and contains the meaning of the actual data so that it obtains a full picture. In this case it describe the implementation of government regulation number 53 year 2010 about discipline of civil servants in the district of Majalengka.

Based on the research, it can be concluded that the implementation of disciplinary rule of civil servants has been carried out but not optimal. This can be seen from two dimensions that have not been carried out optimally, namely: (1) the attitude/tendencies (disposition) of the executive, where some employees are not obedient to work and obey working hours are seen from the attitude of employees who are late coming to the office and out of office without clear information; and (2) inter-organizational communication and implementing activities, where the disciplinary rules of these civil servants have not been disseminated evenly and poorly communicated so that there are some employees who do not understand clearly the contents of the regulations. Meanwhile, the implementation of these rules are seen from the other four dimensions, namely: (1) the size and objectives of the policy, (2) resources, (3) the characteristics of the implementing agent, and (4) economic, social, and political environment has been carried out well.

Keywords: *Policy Implementation, Employee Discipline, Work Entry and Keep Working Hours.*